

Nur Hijerah

(2) PENGARUH PELATIHAN APARATUR DESA, KETERSEDIAAN FASILITAS TEKNOLOGI DAN PENDAMPINGAN PEMERINTA...

-  Prodi Akuntansi
 -  Fak. Ekonomi dan Bisnis
 -  LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III
-

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3180775138

16 Pages

Submission Date

Mar 12, 2025, 1:38 PM GMT+7

4,874 Words

Download Date

Mar 12, 2025, 1:49 PM GMT+7

33,692 Characters

File Name

Nur_Hijerah_211130047_Akuntansi_-_Nur_Hijerah.docx

File Size

64.9 KB

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Small Matches (less than 12 words)

Top Sources

- | | |
|-----|--|
| 14% |  Internet sources |
| 7% |  Publications |
| 0% |  Submitted works (Student Papers) |

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 14%  Internet sources
- 7%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Type	Source	Percentage
1	Internet	jurnalku.org	2%
2	Internet	adoc.pub	2%
3	Internet	www.scribd.com	1%
4	Internet	ejournal.lmiimedan.net	<1%
5	Internet	eprints.umpo.ac.id	<1%
6	Internet	eprints.polsri.ac.id	<1%
7	Internet	ejournal.unhi.ac.id	<1%
8	Publication	Elisabet Rina Anggraini, Jaka Darmawan. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,...	<1%
9	Publication	Enggar Wahyuning Pahlawan, Anita Wijayanti, Suhendro Suhendro. "Pengaruh k...	<1%
10	Internet	www.localstartupfest.id	<1%
11	Internet	dilibadmin.unismuh.ac.id	<1%

12	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
13	Internet	eprints.ahmaddahlan.ac.id	<1%
14	Internet	journal.unmasmataram.ac.id	<1%
15	Internet	www.researchgate.net	<1%
16	Internet	journal.trunojoyo.ac.id	<1%
17	Internet	jurnal.fe.umi.ac.id	<1%
18	Internet	repository.umpalopo.ac.id	<1%
19	Publication	Yogha Erlangga, R Abdul Haris, Tatik Amani, Karnadi Karnadi, Yunaz Farada Yoga....	<1%
20	Internet	dspace.uii.ac.id	<1%
21	Internet	ejournal.kampusmelayu.ac.id	<1%
22	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
23	Internet	staiddagresik.ac.id	<1%
24	Internet	e-journal.umc.ac.id	<1%
25	Internet	e-jurnal.nobel.ac.id	<1%

26 Internet

lib.unnes.ac.id <1%

27 Internet

docobook.com <1%

PENGARUH PELATIHAN APARATUR DESA, KETERSEDIAAN FASILITAS TEKNOLOGI DAN PENDAMPINGAN PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Oleh:

Nur Hijerah

Universitas Muhammadiyah Palopo

Email: nurhijera79@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pelatihan aparatur desa, ketersediaan fasilitas teknologi, dan pendampingan pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan desain asosiatif atau kasual. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ponrang Selatan dengan jumlah responden 58 yang sekaligus sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan aparatur desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara ketersediaan fasilitas teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ini menunjukkan semakin baik fasilitas teknologi semakin baik juga akuntabilitas. dan pendampingan menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, ini mengindikasikan peran vital pendampingan dalam pengelolaan dana, efektivitas program pendampingan pemerintah, pentingnya monitoring dan evaluasi dan dukungan pemerintah berdampak positif.

Kata Kunci: Pelatihan, Ketersediaan Fasilitas, Pendampingan, Akuntabilitas

Abstract

This study aims to examine and analyze the influence of village apparatus training, the availability of technological facilities, and government assistance on the accountability of village fund management with a quantitative approach. This study uses a quantitative method, with an associative or casual design. The population in this study includes all village apparatus involved in the management of village funds in South Ponrang District with a total of 58 respondents who are also the research sample. The results of this study show that the variables of village apparatus training do not have a significant influence on the accountability of village fund management. While the availability of technology facilities has a positive and significant effect on the accountability of village fund management, it shows that the better the technology facilities, the better the accountability. and mentoring shows a positive and significant effect on the accountability of village fund management, this indicates the vital role of mentoring in fund management, the effectiveness of government assistance programs, the importance of monitoring and evaluation and government support has a positive impact.

Keywords: Availability of Facilities, Mentoring, Accountability

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu program yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya melalui *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dana Desa yang mencakup sumber pendapatan desa, tata kelola keuangan, dan akuntabilitasnya*. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan dana desa menjadi topik penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Dana desa yang dialokasikan melalui (APBD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa serta mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Namun, meskipun potensi dana desa ini sangat besar dalam memperbaiki kualitas hidup dalam masyarakat pedesaan, tantangan terkait akuntabilitas pengelolaannya masih menjadi perhatian utama. Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan dana desa merujuk pada transparansi, keterbukaan, serta tanggung jawab aparatur desa dalam penggunaan dana untuk kepentingan public.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi isu yang krusial karena menyangkut anggaran pengelolaan yang signifikan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Berbagai faktor yang memengaruhi sejauh mana akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai. Salah satunya adalah Kualitas pelatihan yang diterima oleh aparatur desa. Pelatihan yang efektif mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memahami peraturan, tata kelola keuangan, serta prosedur pelaporan yang diperlukan. Menurut Kuncahyo & Dharmakarja (2022) Aparat desa yang memiliki Pelatihan akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif dan keuangan, sehingga pelatihan yang sistematis sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur desa menjadi salah satu kendala utama yang menghambat dana desa akuntabel. Menurut penelitian yang dilakukan LPKN (2024), pelatihan efektif meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk mengelola keuangan secara lebih transparan dan bertanggung jawab. Penelitian lain oleh Purba (2020) juga menemukan bahwa pemahaman dan peran perangkat desa yang diperoleh melalui pelatihan berhubungan positif dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, program pelatihan yang berkelanjutandan terarah sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan **prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat**.

Selain itu, ketersedianya fasilitas teknologi juga berperan penting. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi instrument vital dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan teknologi, seperti perangkat keras dan lunak serta akses internet, menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem informasi keuangan desa yang transparan dan efisien. Teknologi memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat dan pemerintah. Penelitian oleh Pahlawan et al (2020) menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas teknologi, seperti sistem informasi keuangan desa, secara signifikan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lain oleh Indraswari (2021) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, bersama dengan kompetensi pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat, memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi

11 bukan hanya alat bantu administrative, tetapi juga instrument penting dalam memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

Tidak kalah pentingnya adalah peran pendampingan dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pendampingan ini berfungsi untuk memberikan arahan, pengawasan, serta dukungan teknis yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa. Penelitian oleh Dewi et al (2021) menemukan bahwa pendampingan yang efektif dapat meningkatkan keterampilan aparatur desa, membantu mereka mengetahui tata cara yang berlaku, dan menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih baik. Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait, seperti kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, memberikan arahan dan supervisi untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tanpa pendampingan yang memadai, terdapat resiko penyimpanan atau inefisiensi dalam penggunaan dana desa, yang pada akhirnya dapat merusak tujuan dari alokasi dana tersebut.

Oleh karena itu, penelitian mengenai Pengaruh pelatihan aparatur desa, ketersediaan fasilitas teknologi, dan pendampingan pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat relevan dalam konteks pengembangan kebijakan publik di Indonesia. Akuntabilitas mencerminkan bahwa aparatur desa telah menjalankan tugasnya dengan benar, etis dan tanggung jawab dalam mengelola dana desa. Dengan kata lain, akuntabilitas berperan sebagai tolak ukur yang menilai sejauh mana aparatur desa bertanggung jawab atas pekerjaan mereka (Dewi & Gayatri, 2019). memahami bagaimana ketiga faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi Terhadap peningkatan akuntabilitas adalah langkah penting dalam menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara konferensif pengaruh pelatihan aparatur desa, ketersediaan fasilitas teknologi, dan pendampingan pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan pendekatan kuantitatif. Secara spesifik, bertujuan untuk menilai sejauh mana pelatihan yang diberikan aparatur desa mampu meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam mengelola dana desa secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengesplorasi peran ketersediaan fasilitas teknologi dalam memperlancar proses pencatatan, pelaporan dan pengelolaan keuangan desa, serta bagaimana teknologi tersebut berkontribusi terhadap akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur pengaruh pendampingan dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa secara akuntabel.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Kajian Literatur

1. Pelatihan Aparatur Desa

Pelatihan Aparatur Desa merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang terlatih memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengelolah keuangan, membuat laporan, serta menjalankan regulasi terkait pengelolaan dana desa (lubis, 2021). Menurut fitriani (2020) pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek teknis penyusunan laporan keuangan hingga aspek manajerial yang berkaitan dengan pengembalian keputusan terkait anggaran desa. Pelatihan yang baik mampu meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan laporan keuangan desa, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat lebih terjamin (Laporan BPK,2020).

2. Ketersediaan Fasilitas Teknologi

Ketersediaan fasilitas teknologi yang memadai, terutama dalam bentuk aplikasi atau system informasi, memainkan peran penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknologi informasi memungkinkan proses pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien, akurat dan transparan (wahyudi, 2021). Adanya teknologi memungkinkan laporan keuangan desa dapat diakses secara realtime, meminimalisasi kemungkinan terjadinya manipulasi data, serta memungkinkan public dan otoritas terkait untuk memantau penggunaan dana secara langsung. Menurut sari et al. (2022), desa-desa yang memiliki fasilitas teknologi yang memadai dalam pengelolaan keuangan cenderung lebih akuntabel dibandingkan desa yang masih menggunakan metode konvensional. Teknologi juga berfungsi sebagai alat control yang efektif bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan secara digital.

3. Pendampingan pemerintah

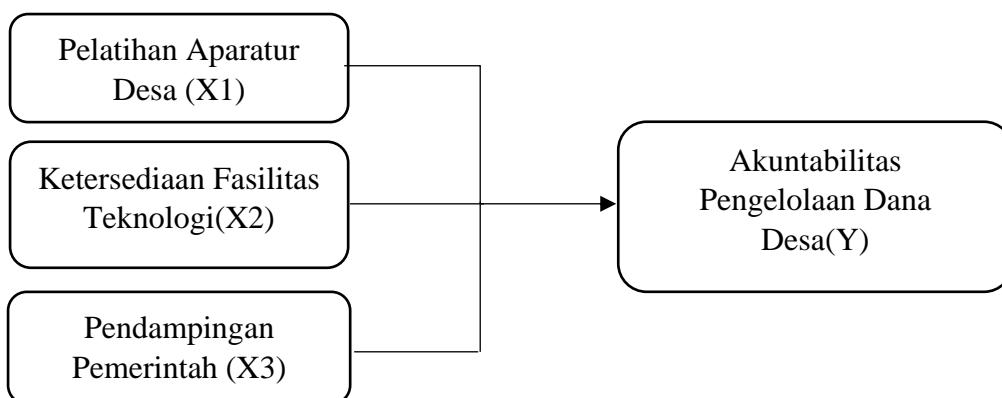
Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah juga menjadi faktor kunci dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Juliano & Dewi (2019) menyatakan bahwa walaupun pengelolaan keuangan desa sudah diawasi dengan adanya Siskeudes, tetap saja peran pendamping diperlukan dalam pengawasan penggunaan dana desa. Pendampingan ini mencakup pemberian bimbingan teknis, pengawasan, serta evaluasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa aparatur desa mematuhi regulasi yang berlaku (Simanjuntak,2022). Pendampingan oleh tenaga ahli maupun instansi terkait membantu meningkatkan kempampuan aparatur desa dalam memahami aturan-aturan akuntansi public serta tata kelola keuangan desa yang baik. Widyastuti et al. (2022) dalam studi mereka tentang efektifitas pendampingan pemerintah dalam pengelolaan dana desa di Indonesia menemukan bahwa pendampingan yang efektif menyangkut: asistensi teknis dalam perencanaan dan penganggaran, bimbingan dalam implementasi program dan kegiatan.

4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang diambil dalam pengelolaan dana, khususnya terkait dengan kewajaran dan keterbukaan dalam penggunaannya (Mulya,2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa juga merupakan tanggungjawab pemerintah desa untuk mengelolah sesuai dengan undang-undang pengelolaan keuangan desa (Ningsih, Arza, & Sari, 2020). Akuntabilitas ini mencakup transparansi, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam penggunaan dana public. Dalam hal pengelolaan dana desa, Akuntabilitas menjadi tolak ukur keberhasilan program pembangunan desa. Akuntabilitas Pengelolaan dana desa juga terkait erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban (Suryadi,2019). Pengelolaan dana desa yang akuntabel penting untuk mencegah terjadinya korupsi, penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Akuntabilitas yang baik akan tercapai apabila aparatur desa memiliki kompetensi yang memadai, teknologi yang mendukung, serta adanya pengawasan yang konsisten dari pemerintah.

B. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah kerangka konseptual dari penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.



Gambar 1: Kerangka Konseptual

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pelatihan Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pelatihan bagi aparatur desa merupakan salah satu bentuk intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan para pemangku kebijakan di tingkat desa. Aparatur desa yang terlatih dengan baik akan lebih memahami regulasi, prosedur administrasi, Serta tata kelola keuangan yang baik. Herlianto (2020) menunjukkan bahwa aparatur desa yang mendapatkan pelatihan berkala memiliki pemahaman lebih baik tentang prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban. Aparatur desa yang mendapatkan pelatihan akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelolah dana desa secara akuntabel, memahami kewajiban untuk memberikan laporan yang transparan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Pelatihan juga memberikan pemahaman terkait standar akuntansi pemerintahan, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan.

20 **H1:** Pelatihan aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1 **2. Pengaruh Ketersediaan Fasilitas Teknologi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa. Ketersediaan fasilitas teknologi, seperti computer, internet, dan sistem informasi keuangan desa, memungkinkan proses pencatatan keuangan, pelaporan, dan pengawasan dilakukan dengan lebih akurat dan cepat. Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat pelaporan keuangan karena mempermudah integrasi laporan dari pemerintah desa ke pemerintah pusat (Anggraeni & Yuliani, 2019). Teknologi informasi memungkinkan pengelolaan dana desa dilakukan dengan sistem yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. Dengan adanya fasilitas teknologi yang memadai, aparatur desa dapat mengelola data keuangan secara real-time, mempermudah akses informasi bagi publik, dan meningkatkan keterbukaan terkait penggunaan dana. Selain itu, teknologi juga membantu dalam menyederhanakan proses audit dan pengawasan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga akuntabilitas dapat lebih terjamin.

26 **H2:** Ketersediaan Fasilitas Teknologi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3 **3. Pengaruh pendampingan pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

Pendampingan pemerintah, baik dalam bentuk bimbingan teknis, supervise, maupun pengawasan, diharapkan mampu memberikan arahan dan kontrol bagi aparatur desa dalam mengelola dana desa secara lebih akuntabel. Studi Susanti (2021) menunjukkan pendampingan insentif dari pemerintah meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntabilitas Pendampingan bagi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sering kali menjadi kunci untuk memastikan bahwa aparatur desa memahami dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan regulasi. Pendampingan ini juga dapat berbentuk penyuluhan terkait tata kelola keuangan, penyediaan instrumen pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Dengan adanya pendampingan berkelanjutan, diharapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat karena adanya control yang lebih baik dan mekanisme sanksi yang jelas bila terjadi penyimpangan.

H3: Pendampingan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain asosiatif atau kasual. Desain ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen (pelatihan, fasilitas, teknologi, dan pendampingan pemerintah) dengan variabel dependen (Akuntabilitas pengelolaan dana desa). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuersiōneг yang telah diisi oleh responden dengan skala tertentu.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ponrang Selatan, yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kecamatan ini terdiri dari beberapa desa yang telah menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat sebagai bagian dari program nasional untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan tingkat desa. Setiap desa di kecamatan ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana desa tersebut secara akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Sampling Jenuh, yaitu dimana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari 58 responden yang mencakup kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta staf lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data diperoleh langsung dari sumbernya oleh pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuersiōneг secara langsung kepada responden. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Variabel Penelitian

- Pelatihan Aparatur Desa (X1): Dalam modul pelatihan yang diterbitkan oleh Kemendes PDTT (2023), Pelatihan aparatur desa dijelaskan sebagai program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas perangakat desa dalam aspek tata kelola pemerintah desa, dan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.
- Ketersediaan fasilitas teknologi (X2): Menurut World Economic Forum (2021), Ketersediaan teknologi dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi digital yang inklusif. Akses yang merata terhadap teknologi dapat mengurangi kesenjangan social dan ekonomi.
- Pendampingan Pemerintah (X3): Pendampingan pemerintah adalah proses dimana pemerintah memberikan dukungan, bimbingan, dan sumber daya kepada individu, kelompok, atau komunitas untuk membantu mereka mencapai tujuan tertentu. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2022), menyatakan bahwa pendampingan pemerintah bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terutama dalam program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

- 19
- Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y): Akuntabilitas pengelolaan dana desa merujuk pada tanggung jawab dan keterbukaan dalam pengelolaan dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dari Fifqiazzah & Rizka (2023), menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang diharapkan, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Teknik Analisis Data

- 24
- Analisis Deskriptif: untuk memberikan gambaran yang jelas tentang data yang ada, sehingga membantu dalam memahami kondisi yang sedang berlangsung. Hasil analisis ini dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis, grafik, diagram, atau visualisasi lain yang mudah dipahami.
 - Uji Validitas dan Reliabilitas: untuk memastikan kualitas data dalam sebuah penelitian, termasuk artikel ilmiah. uji validitas menggunakan korelasi Pearson Corelation dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha.

10 Uji Hipotesis

- Uji t: digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok.
- Uji f: digunakan untuk membandingkan varians antara dua atau lebih kelompok. uji f berguna dalam konteks analisis regresi untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan.
- Uji determinasi (R^2): digunakan untuk mengukur seberapa baik variabel dependen dalam model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1, dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model lebih baik dalam menjelaskan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Item variabel	Correlation (r-hitung)	r-tabel	keterangan
1. Pelatihan Aparatur Desa	X1.1	0,894	0,258	Valid	
	X1.2	0,825	0,258	Valid	
	X1.3	0,814	0,258	Valid	
	X1.4	0,860	0,258	Valid	
	X1.5	0,757	0,258	Valid	
2. Ketersediaan Fasilitas Teknologi	X2.1	0,792	0,258	Valid	
	X2.2	0,572	0,258	Valid	
	X2.3	0,781	0,258	Valid	
	X2.4	0,665	0,258	Valid	
	X2.5	0,628	0,258	Valid	
	X2.6	0,745	0,258	Valid	
3. Pendampingan Pemerintah	X3.1	0,717	0,258	Valid	
	X3.2	0,882	0,258	Valid	
	X3.3	0,603	0,258	Valid	
	X3.4	0,739	0,258	Valid	
	X3.5	0,749	0,258	Valid	
	X3.6	0,711	0,258	Valid	
4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y1	0,683	0,258	Valid	
	Y2	0,670	0,258	Valid	
	Y3	0,744	0,258	Valid	
	Y4	0,729	0,258	Valid	
	Y5	0,782	0,258	Valid	
	Y6	0,669	0,258	Valid	
	Y7	0,678	0,258	Valid	

Sumber: Hasil Output SPSS V25.0,2019

Berdasarkan tabel 1. hasil uji validitas, dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dalam kuersiioner memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel 5% yaitu 0,258 maka seluruh item pernyataan dianggap valid atau sah. metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel dan indikatornya.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Pelatihan Aparatur Desa	.884	Reliabel
2.	Ketersediaan Fasilitas Teknologi	.789	Reliabel
3.	Pendampingan Pemerintah	.830	Reliabel
4.	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	.824	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS V25.0,2019

Uji reliabilitas untuk semua item pernyataan yang ditunjukkan pada Tabel 2. menggambarkan hasil pengukuran yang dapat dipercaya serta memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten setelah dilakukan pengukuran. Variabel akan dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha diatas 0,70 (Ghozali,2021).

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	58	25.00	35.00	29.8448	3.12770
Pelatihan Aparatur Desa	58	13.00	25.00	20.2069	3.07656
Ketersediaan Fasilitas Teknologi	58	18.00	30.00	24.2241	2.82869
Pendampingan Pemerintah	58	20.00	30.00	25.2759	3.11078
Valid N (listwise)	58				

Sumber: Hasil Output SPSS V25.0,2019

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif diatas dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa nilai rata-rata adalah 29,84 yang menunjukkan nilai tengah dari responden, kemudian nilai 25 hingga 35 menunjukkan bahwa ada responden yang memberikan nilai terendah dan tertinggi pada variabel tersebut. Selanjutnya nilai pelatihan aparatur desa, rata-rata nilai 20,20 nilai terendah 13 dan nilai tertinggi 25 dan standar deviasi 3,07 menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki nilai pelatihan yang sedang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan individu dalam hal penekanan pada pelatihan dipengaruhi oleh Pendidikan dan pengalaman hidup. Ketersediaan fasilitas teknologi nilai rata-ratanya adalah 24,22 dengan nilai minimum 18 dan maksimum 30 serta standar deviasi 2,82 ini menunjukkan bahwa secara umum desa memiliki ketersediaan fasilitas yang sedang yang artinya fasilitas didesa belum memadai. Selanjutnya, pendampingan pemerintah dengan nilai rata-rata 25,27 dengan nilai terendah 20 dan nilai tertinggi 30 dan standar deviasi 3,11 menunjukkan bahwa pendampingan dari pemerintah masih di tingkat sedang. Ini menunjukkan bahwa aparatur desa masih butuh pendampingan yang semaksimal mungkin.

25
Tabel 5. Uji Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji f, dan Uji Determinasi

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	t tabel	Sig.
	B	Std. Error				
(Constant)	3.789	.963		3.933	2,003	.000
Pelatihan Aparatur Desa	-.018	.139	-.018	-.130	2,003	.897
Ketersediaan Fasilitas Teknologi	.590	.104	.533	5.649	2,003	.000
Pendampingan Pemerintah	.480	.134	.478	3.591	2,003	.001
Adjusted R Square				.964		
Sig. F				<.000 ^b		

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil Output SPSS V25.0,2019

Hasil pada tabel 5. di atas persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut: $Y=3,789 -0,018X1+0,590X2+0,480X3$

Berdasarkan tabel 4 hasil yang diperoleh dari persamaan regresi linear berganda menunjukkan besarnya arah hubungan pada masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Nilai Konstanta sebesar 3,789 menunjukkan bahwa semua variabel independent pelatihan aparatur desa, ketersediaan fasilitas teknologi, dan pendampingan pemerintah bernilai 0, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan bernilai 3,789. Kemudian uji hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel dan nilai t-sig dengan a: 0,5. apabila t-hitung > t-tabel atau t-sig < dari a: 0,05 maka diterima H1 atau tolak H0. Sebaliknya, apabila t-hitung < t-tabel atau t-sig > dari a: 0,05 maka tolak H1 atau terima H0.

Variabel X1 Pelatihan Aparatur Desa, nilai B sebesar -0,018 dan nilai beta sebesar -0,018 dengan nilai signifikansi 0,897 (>0,05) dan nilai t -0,130 < 2,003 menunjukkan bahwa H1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikansi >0,05. Variabel X2 Ketersediaan Fasilitas Teknologi, nilai B sebesar 0,590 dan nilai beta sebesar 0,533 dengan nilai signifikansi 0,000(<0,05) dan nilai t 5,649 > 2,003 menunjukkan bahwa H2 memiliki pengaruh positif signifikan terbesar. Ketersediaan fasilitas teknologi merupakan faktor yang paling berpengaruh. Variabel X3 Pendampingan Pemerintah, nilai B sebesar 0,480 dan nilai beta sebesar 0,478 dengan nilai signifikansi 0,001(<0,05) dan nilai t 3,591 > 2,003 menunjukkan bahwa H3 juga berpengaruh positif signifikan.

Kemudian dapat dilihat pada tabel 5. nilai sig F <0,000 menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara keseluruhan. artinya secara bersama-sama variabel independent memiliki pengaruh yang singnifikan terhadap variabel dependen. Nilai Rsquare yang telah disesuaikan untuk penelitian ini ada pada tabel 5. sebesar 0,964 menunjukkan bahwa 96,4% variasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan pada variabel independent dalam model ini. sisanya 3,6% dijelaskan oleh faktor lain diluar model yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh pelatihan aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan aparatur desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. **H1 ditolak**, hal ini mungkin disebabkan oleh kualitas pelatihan yang belum optimal, metode pelatihan yang kurang efektif, kurangnya implementasi hasil penelitian dan faktor-faktor lain yang lebih dominan. Hasil ini sejalan dengan penelitian triyono et al, dari latif & susilatri (2021) yang menunjukkan bahwa pelatihan bagi aparatur desa tidak memiliki dampak signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan analisis, pelatihan tidak menjadi faktor utama dalam penyusunan laporan keuangan desa, karena dengan pendidikan tingkat menengah, pengalaman, dan kompetensi yang terbatas, aparatur desa masih dapat menjalankan tugasnya. Selain itu, pemerintah daerah bersama dengan aparatur pengawas daerah secara aktif memberikan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan guna meningkatkan akuntabilitas aparatur desa.

Oleh karena itu, meskipun latar belakang pendidikan tidak selalu relevan dengan bidang pencatatan dan pelaporan keuangan desa, aparatur tetap mampu beradaptasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Saat ini, syarat untuk menjadi pengelola keuangan desa hanya sebatas memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat tanpa ketentuan khusus mengenai keahlian dalam mengelola keuangan. Hal ini sejalan dengan permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa perangkat desa minimal berpendidikan SMA. Astini et al. (2019) juga menyatakan bahwa pengalaman aparatur desa tidak menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa, karena adanya pendampingan yang diberikan kepada mereka.

2. Pengaruh ketersediaan fasilitas teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketersediaan fasilitas teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis **H2 diterima**. ini menunjukkan semakin baik fasilitas teknologi semakin baik juga akuntabilitas, teknologi berperan crucial dalam pengelolaan dana desa, modernisasi sistem pengelolaan sangat efektif dan infestasi dibidang teknologi memberikan dampak positif. Terutama dalam penggunaan komputer sangat membantu dalam pengolahan data keuangan secara lebih cepat dan akurat. Berdasarkan hasil observasi, kantor desa telah dilengkapi dengan perangkat computer serta didukung dengan akses internet. Pemanfaatan teknologi ini mampu mempercepat penyusunan laporan keuangan agar dapat diselesaikan tepat waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Aziz dan Prastiti (2019), yang menyatakan bahwa penggunaan internet mempermudah sistem administrasi keuangan. Selain itu, pemanfaatan internet juga mempercepat proses pengelolaan serta pengiriman data antarinstansi pemerintah. Sementara itu, website digunakan sebagai sarana akuntabilitas dalam menyajikan informasi mengenai penyelenggaran pemerintah desa, termasuk laporan pertanggungjawaban. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan desa yang belum memanfaatkan website sepenuhnya, sesuai dengan temuan dari kuisioner mengenai penggunaannya.

22 3. Pengaruh pendampingan pemerintah terhadap akuntabilitas dana desa

16 Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa **H3 diterima**, ini mengindikasikan peran vital pendampingan dalam pengelolaan dana, efektivitas program pendampingan pemerintah, pentingnya monitoring dan evaluasi dan dukungan pemerintah berdampak positif. Pendampingan pemerintah berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas karena memberikan panduan, pengawasan, dan penguatan kapasitas aparatur desa. Menurut Pratiwi & Muliasari (2020) Pendampingan merupakan hal yang paling penting karena peserta didampingi dalam penyusunan laporan keuangan desa sampai mereka paham. Ketika prangkat desa mendapatkan pendampingan yang baik, mereka akan lebih memahami prosedur pengelolaan keuangan yang benar dan penting transparasinya. Permendagri No. 84 tahun 2015 dari faizah (2022) menyatakan bahwa pendampingan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan. Pendampingan juga membantu aparatur desa memahami regulasi dan prosedur yang benar dan juga memberikan supervise dalam implementasi program, membantu mendeteksi dan mencegah penyimpangan. Pendampingan pemerintah juga dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip good governance.

Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan dana desa lebih efektif dicapai melalui kombinasi ketersediaan teknologi yang memadai dan pendampingan pemerintah yang intensif, sementara pelatihan formal aparatur desa bukan menjadi faktor utama. Fokus utama sebaiknya diberikan pada penyediaan infrastruktur teknologi dan program pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, faktor yang paling berpengaruh adalah ketersediaan fasilitas teknologi dan pendampingan pemerintah. Sementara itu, pelatihan aparatur desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Secara jelasnya pelatihan aparatur desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini kemungkinan karena kualitas pelatihan yang belum optimal atau metode pelatihan yang kurang efektif. Sedangkan ketersediaan fasilitas teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik fasilitas teknologi yang tersedia, semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena teknologi mempercepat pencatatan, pelaporan dan transparansi. Dan pendampingan pemerintah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pendampingan yang insentif membantu aparatur desa dalam memahami regulasi, meningkatkan pengawasan, serta mencegah penyalahgunaan dana desa. Dengan demikian, saran utama pada penelitian ini adalah memperkuat ketersediaan fasilitas teknologi dan meningkatkan efektivitas pendampingan pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, program pelatihan aparatur desa perlu dievaluasi dan direformulasi agar lebih efektif dalam mendukung akuntabilitas keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162-172.
- Kuncayyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan mojogedang karanganyar jawa tengah. *Akuntansiku*, 1(4), 299-319.
- Purbasari, P. I. (2020). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jembrana* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA).
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa serta komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(1).
- Purba, S. (2020). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 3(1), 10-19.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269-1298.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Dewi, L. P. P., & Dewi, G. A. R. S. (2021). Pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 12(1), 820-829.
- Lubis, P. (2021). *Kebijakan Kepala Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Wiralestari, W., Sam, I., Lutfi, L., Fitriani, D., & Wendry, W. S. (2020). Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Mendalo Indah. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 206-210.
- Pratama, A., & Wahyudi, A. (2021). Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Utan). *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 118-129.
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517-3532.
- Sari, N. P. M., Supriliyani, N. W., & Yudharta, I. P. D. (2022). Innovative Governance dalam Pengelolaan Desa Digital (Studi Kasus: Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). *Universitas Udayana*.
- Setiawati, L., Simanjuntak, V., & Werimon, S. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari). *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 6, 14.
- Yandrizal, Y. (2021). ANALISIS KESIAPAN PELATIHAN PADA MASA DAN PASCA PANDEMI COVID-19 BERBASIS TEKNOLOGI. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).

- Fifqiazzah, A. O., & Rizka, S. A. (2023). *Pengelolaan Dan Akuntabilitas Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Positif (Studi di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Latif, A., Savitri, E., & Susilatri, S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 183-192.
- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati, W. (2019). Determinan yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 29-47.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344.
- Faizah, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763-776.
- Pratiwi, D. N., & Muliasari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158- 162.
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). In *UMMagelang Conference Series* (pp. 266-284).